

## **ABSTRAK**

Oleh:

**Salmalia Tae**

Dibimbing Oleh

**Dr. Angela Merici Minggu, SE., M.Si.,Ak, dan Dr. Christian D. Manu, SE.,  
M.Sc.,Ak**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Meskipun jumlah kendaraan bermotor di Kota Kupang terus mengalami peningkatan, masih tingginya jumlah tunggakan pajak menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor belum optimal. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, di antaranya melalui kebijakan *Tax Amnesty* Kendaraan Bermotor yang memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi serta penyediaan layanan Samsat Keliling guna mempermudah masyarakat dalam membayar pajak. Selain faktor eksternal tersebut, faktor internal berupa kesadaran wajib pajak juga diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak, dan Layanan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak, dan Layanan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang

(SAMSAT Kota Kupang). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 44 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics 27 melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan *Tax Amnesty* belum mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara langsung. Sebaliknya, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, Layanan Samsat Keliling juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudahan akses pelayanan, efisiensi waktu, serta kedekatan lokasi pelayanan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Secara simultan, *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak, dan Layanan Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebagian besar variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Secara teoritis, penelitian ini mendukung Teori Atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan layanan Samsat Keliling sebagai faktor eksternal memberikan kemudahan yang mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, *Tax Amnesty* belum mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga menunjukkan bahwa kebijakan

insentif saja belum cukup untuk membentuk perilaku patuh apabila tidak disertai dengan kesadaran wajib pajak.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang dalam meningkatkan efektivitas pelayanan perpajakan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak, memperluas jangkauan layanan Samsat Keliling, memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi perpajakan, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah desa, kelurahan, dan berbagai komunitas masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, diharapkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**Kata Kunci:** *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak, Layanan Samsat Keliling, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.